LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II

Tahun

2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KALIMANTAN TIMUR

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
TRIWULAN II TAHUN 2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Pada Triwulan II Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Triwulan II Tahun 2025 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan.

Balikpapan, 04 Juli 2025

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI i
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 2
1.3 Maksud dan Tujuan 2
BAB II 4
PENGUMPULAN DATA SKM 4
2.1 Pelaksana SKM 4
2.2 Metode Pengumpulan Data 4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data 5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM 5
2.5 Penentuan Jumlah Responden 6
BAB III 7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM 7
3.1 Jumlah Responden SKM 7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) 9
BAB IV 10
ANALISIS HASIL SKM 10
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan 10
4.2 Rencana Tindak Lanjut 10
4.3 Tren Nilai SKM 11
BAB V 13
KESIMPULAN 13
LAMPIRAN 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link *https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22* yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2025	8
2.	Pengumpulan Data	April – Juni 2025	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2025	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2025	7

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2025, maka populasi penerima layanan pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan dalam kurun waktu triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 70 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 59 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 79 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	61	77%
		Perempuan	18	23%
2	Usia	<25	5	6%
		25-45	28	35%
		46-60	46	58%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	10	13%
		SMP	0	0%
		SMA	61	77%
		D3	0	0%
		S1	8	10%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	0	0%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	1	1%
		Pegawai Swasta	77	97%
		Wirausaha Non KKP	1	1%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	0	0%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	16	20%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	61	77%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik		1%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik		33%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	1	1%

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,85	3,85	3,85	3,82	3,82	3,80	3,84	3,85	3,82
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	95,82 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

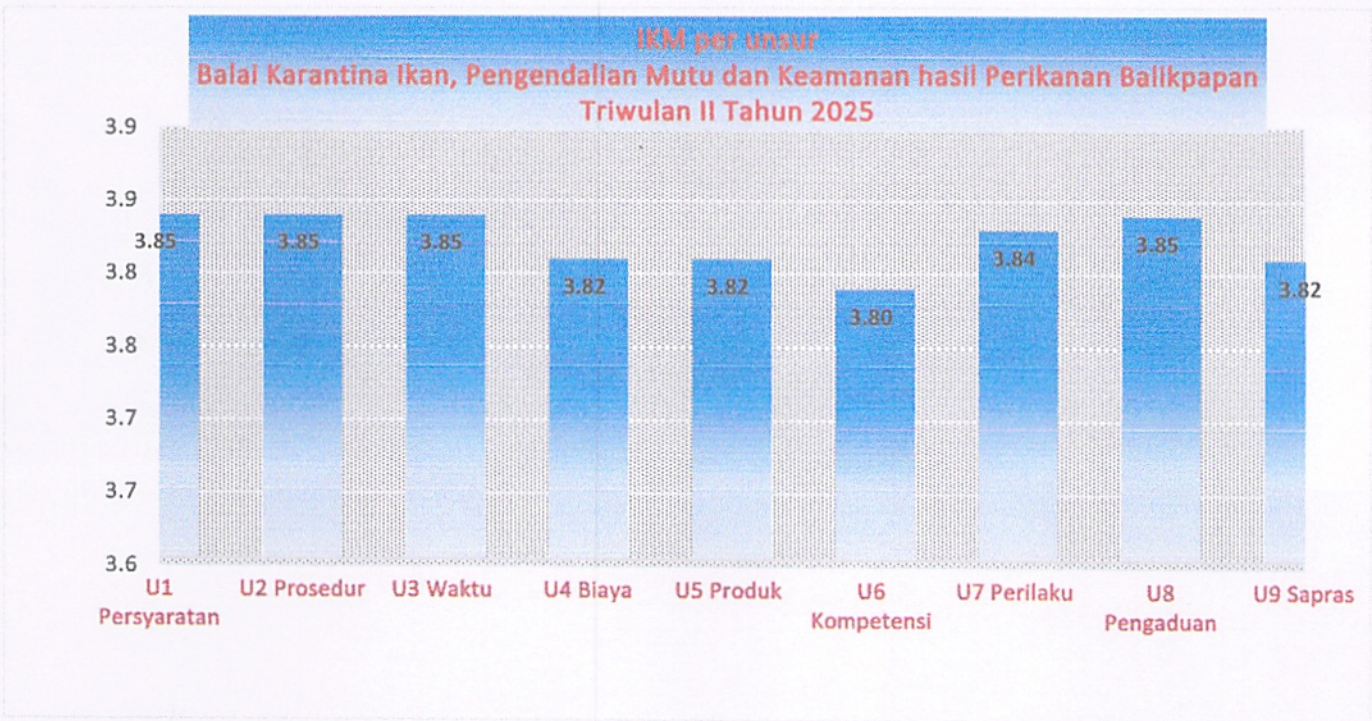

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,80. Selanjutnya Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai 3,82 adalah nilai terendah kedua dan Sarana dan Prasarana yang mendapatkan nilai 3,82 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Persyaratan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,85. Selanjutnya Sistem, Mekanisme dan Prosedur mendapatkan nilai 3,85 dan Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai yaitu 3,85.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- "aplikasi siap mutu terkadang masih ada eror dan bug"

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kompetensi pelayanan perlu ditingkatkan lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan terkait pelayanan publik.
- Belum memahami dengan baik tentang standar pelayanan publik yang berlaku, termasuk spesifikasi jenis pelayanan yang seharusnya diberikan.
- Sarana dan prasarana yang memadai namun belum optimal untuk dilakukan pemeliharaannya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini

dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan pada bulan Juli sampai dengan September 2025. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan III 2025)			Penanggung Jawab
			Juli	Agustus	September	
1	Komptensi pelayanan	1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) 2. Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait produk spesifikasi jenis pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3	Sarana dan Prasarana	4. Melakukan asistensi penggunaan alat elektronik yang disiapkan di ruang pelayanan untuk penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :

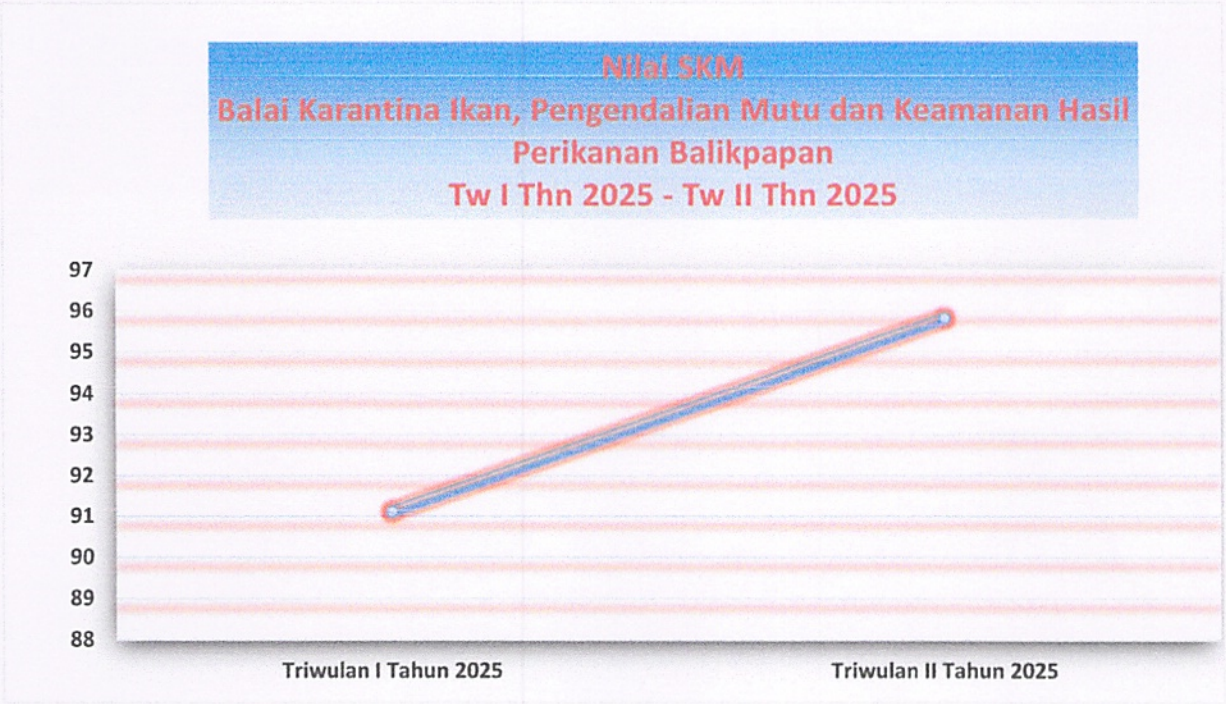

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari periode triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 95,82. Kemudian nilai SKM Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari triwulan I 2025 hingga triwulan II 2025
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelayanan, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Sarana dan Prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur dan Waktu Penyelesaian.

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

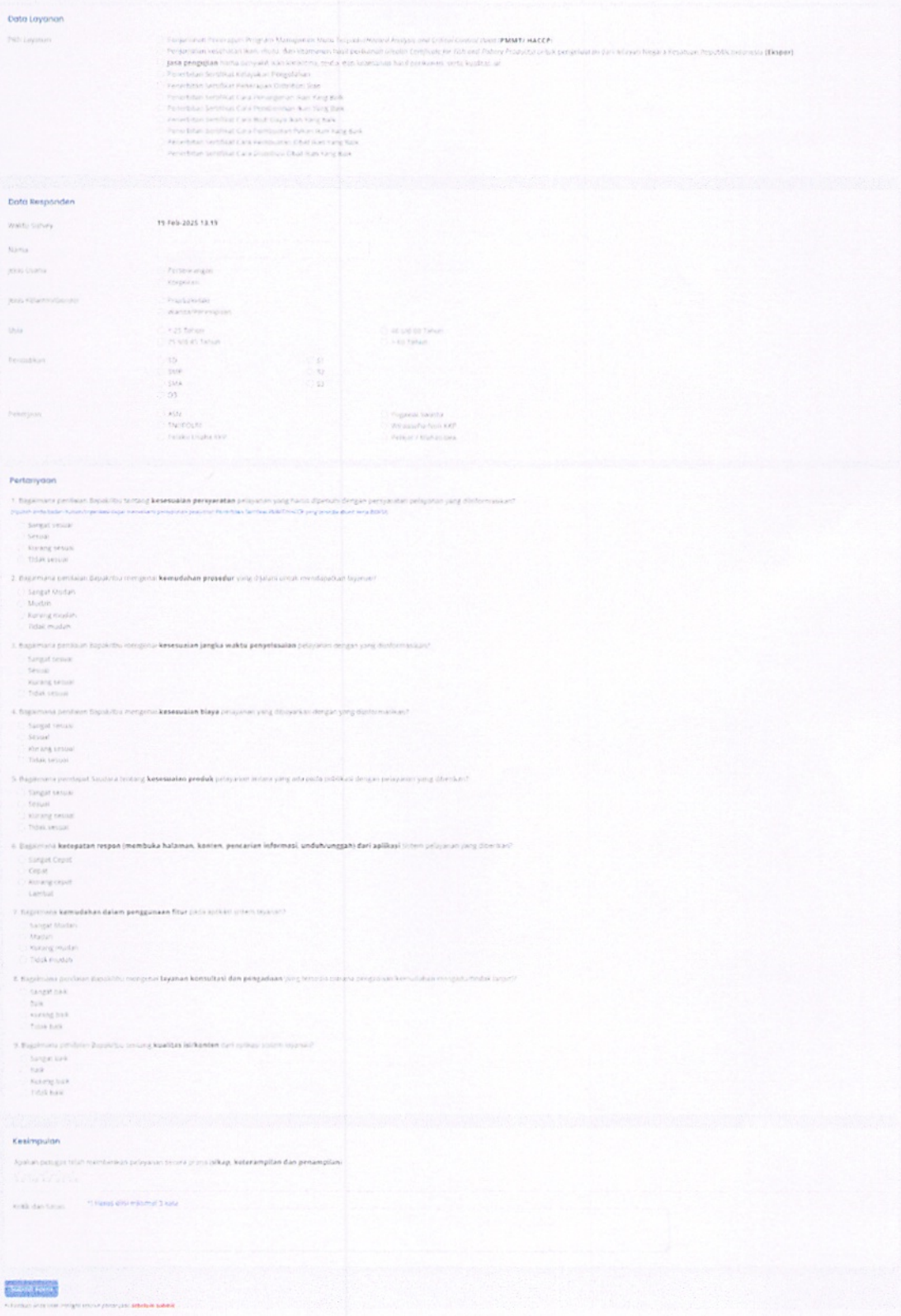

Data Layanan

Jenis Layanan

- Pengajuan Penerapan Program Manajemen Mutu Berbasis Hazard Analysis and Critical Control Point (**PMMT/ HACCP**)
- Pengajuan sertifikat Ikan, Mutu dan Keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
- Jasa pengujian mutu (organoleptik, kimia, mikrobiologi, media, residu, kadar air, kadar garam, serta kualitas air)
- Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
- Penerbitan Sertifikat Penanganan Distribusi Ikan
- Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembongkaran Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembudidaya Pakan Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembudidaya Obat Ikan Yang Baik
- Penerbitan Sertifikat Cara Produksi Obat Ikan Yang Baik

Data Responden

Waktu Survey: 11 Feb 2025 13.19

Nama

Jenis Usaha: Perseorangan / Kelompok

Jenis Kelamin/Gender: Pria/Laki-laki / Wanita/Perempuan

Usia: < 25 Tahun; 25 s/d 45 Tahun; 46 s/d 60 Tahun; > 60 Tahun

Pendidikan: SD; SMP; SMA; D1; D2; S1

Pekerjaan: ASN; TNI/POLRI; Pelaku Usaha KKP; Pegawai Swasta; Wiraswasta Non KKP; Pelaku Pariwisata

Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang **kesesuaian persyaratan** pelayanan yang harus dipenuhi dengan persyaratan pelayanan yang diinformasikan?
(Contoh: Untuk Sertifikat Kelayakan Pengolahan persyaratan yang harus dipenuhi adalah Sertifikat PMMT/HACCP yang sesuai dengan jenis ikan)
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai
2. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai **kemudahan prosedur** yang dijalani untuk mendapatkan layanan?
   - Sangat Mudah
   - Mudah
   - Kurang mudah
   - Tidak mudah
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian jangka waktu penyelesaian** pelayanan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai **kesesuaian biaya** pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang **kesesuaian produk** pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan pelayanan yang diberikan?
   - Sangat sesuai
   - Sesuai
   - Kurang sesuai
   - Tidak sesuai
6. Bagaimana **ketepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi** sistem pelayanan yang diberikan?
   - Sangat Cepat
   - Cepat
   - Kurang cepat
   - Lambat
7. Bagaimana **kemudahan dalam penggunaan fitur** pada aplikasi sistem layanan?
   - Sangat Mudah
   - Mudah
   - Kurang mudah
   - Tidak mudah
8. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai **layanan konsultasi dan pengaduan** yang tersedia (cara penyampaian kemudahan mengaduh/tindak lanjut)?
   - Sangat baik
   - Baik
   - Kurang baik
   - Tidak baik
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang **kualitas isi/konten** dari aplikasi sistem layanan?
   - Sangat baik
   - Baik
   - Kurang baik
   - Tidak baik

Kesimpulan

Apakah petugas telah memberikan pelayanan secara profesional, **keterampilan dan penampilan**:

Kritik dan Saran: * Harap diisi minimal 3 kata

Kirimkan tanggapan Anda

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
PERIODE TRIWULAN II 2025

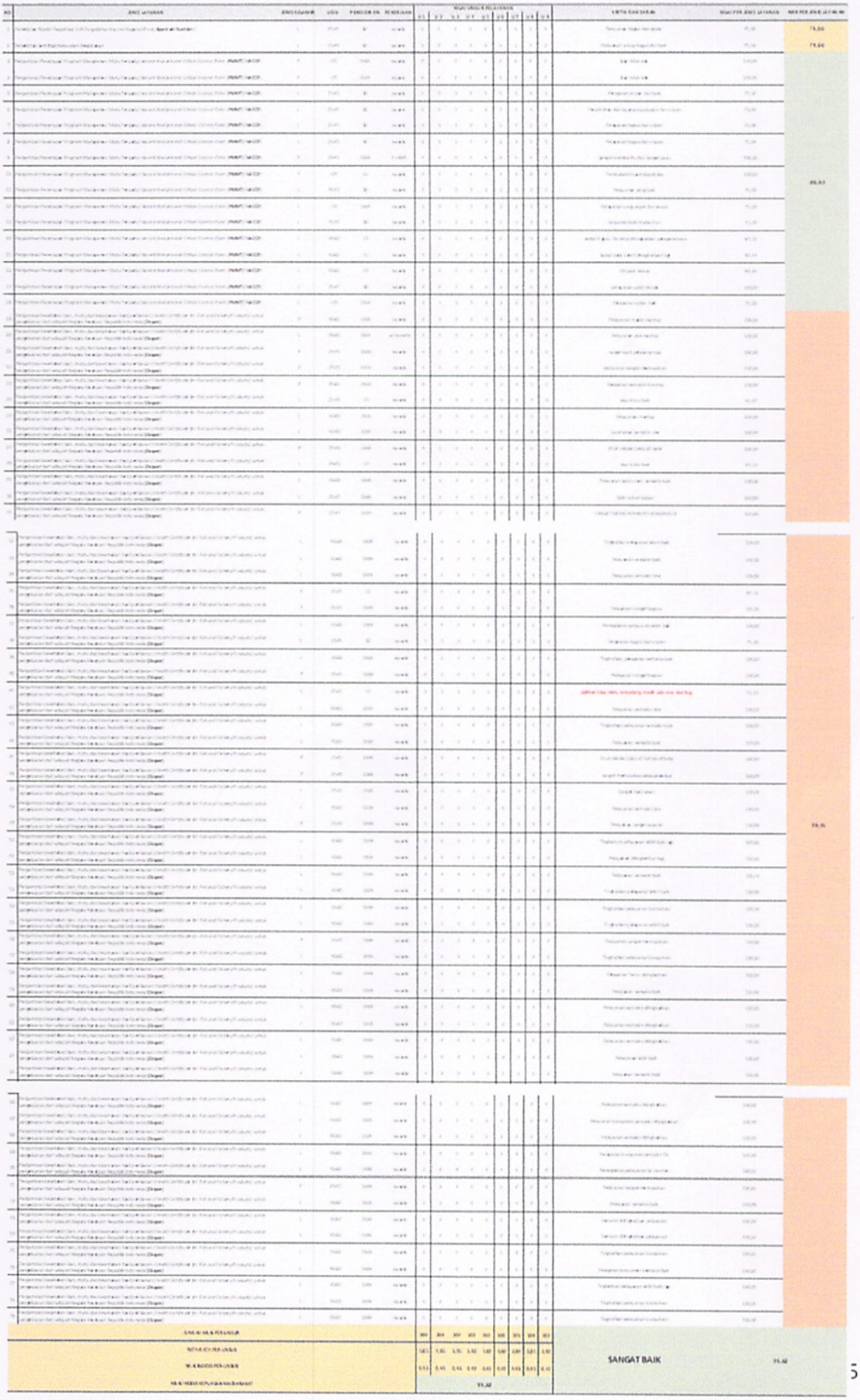

No	Katakteristik	Indikator	Jumlah	Presentase
1	Jenis kelamin	Laki laki	61	77%
		Perempuan	18	23%
2	Usia	kurang 25	5	6%
		lebih 60	0	0%
		25-45	28	35%
		46-60	46	58%
3	Pendidikan	SD	10	13%
		SMP	0	0%
		SMA	61	77%
		S1	8	10%
		S2	0	0%
4	Pekerjaan	P.UKKP	1	1%
		PNS	77	97%
		Swasta	1	1%
5	Jenis layanan	Penerbitan Nomor Registrasi Unit Pengolahan Ikan ke Negara Mitra (Approval Number)	1	1%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	1	1%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	16	20%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	61	77%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	96,20	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	96,20	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	96,20	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	95,57	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,57	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	94,94	A	Sangat Baik
U7	Perilaku Pelaksana	95,89	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	96,20	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	95,57	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

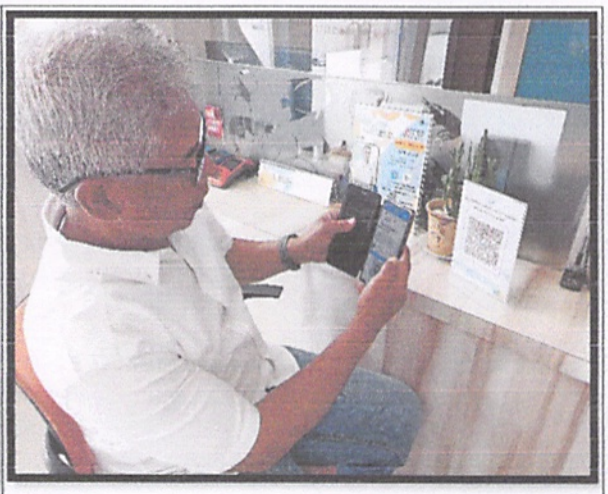

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

KKP 2025 | panganbiru | 08

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Triwulan II Tahun 2025

Mutu Pelayanan :

95,82

Sangat Baik

Periode Survei : April s/d Juni 2025

Usia:
- <25 : 5 Responden
- 25 - 45 : 28 Responden
- 46 - 60 : 46 Responden
- >60 : 0 Responden

Jenis Kelamin :
- Laki - laki : 61 Responden
- Perempuan : 18 Responden

Pendidikan:
- Sd : 10 Responden
- SMP : 0 Responden
- SMA : 61 Responden
- Diploma : 0 Responden
- S1 : 8 Responden
- S2 : 0 Responden
- S3 : 0 Responden

79 Responden

Unsur Pelayanan :

1	PERSYARATAN	3.85
2	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	3.85
3	WAKTU PENYELESAIAN	3.85
4	BIAYA / TARIF	3.82
5	PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN	3.82
6	KOMPETENSI PELAKSANA	3.80
7	PERILAKU PELAKSANAN	3.84
8	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	3.85
9	SARANA DAN PRASARANA	3.82

#BPPMHKP BALIKPAPAN YEES

"Terimakasih atas penilaian yang telah diberikan, kritik dan saran anda sangat berharga bagi kemajuan unit kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kami"

BPP MHKP | BADAN MUTU KKP BALIKPAPAN

BADAN MUTU KKP BALIKPAPAN

YEES bppmhkp balikpapan

ppid.kkp.go.id/upt/balai-kipm-balikpapan/

bangga melayani bangsa BerAKHLAK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAN ww.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B. 20 /BKIPM.BPN/KP.440/I/2025

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT/PELANGGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI KIPM BALIKPAPAN TAHUN 2025

KEPALA BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai KIPM Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa KIPM, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan: Surat Tugas Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai KIPM Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai KIPM Balikpapan Tahun 2025 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	:	Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	:	Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	:	Novita, S.St.Pi
Anggota	:	Winda Anggraini, S.St.Pi
		Heri Supriadi
		Frederik Sanda
		Zainal, S.Pi

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai KIPM Balikpapan sebagai berikut:

1. Pembina/Pengarah : Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik
2. Ketua :
   - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada
   - Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Sekretaris :
   - Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat
   - Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat
   - Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat
4. Anggota :
   - Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat

- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai KIPM Balikpapan Tahun Anggaran 2025, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2025

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai KIPM Balikpapan

KEENAM : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Balikpapan, 2 Januari 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Lembar Pengesahan	
Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Eko Sulystianto

4. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan I Tahun 2025

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan

agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan periode triwulan I tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat baik nilai 91,11 (sembilah puluh satu koma sebelas) dengan kualitas mutu A pada berbagai unsur pelayanan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2025

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	3,66	A
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,64	A
3	Waktu Penyelesaian	3,64	A
4	Biaya/Tarif	3,64	A
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,64	A
6	Kompetensi Pelaksana	3,63	A
7	Perilaku Pelaksana	3,66	A
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,64	A
9	Sarana dan Prasarana	3,64	A

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan I 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1.	U2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur	• Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik • Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan		√		Tim Pelayanan Publik
2.	U3 Waktu Penyelesaian	• Membuat janji layanan dengan memuat jenis dan waktu layanan yang harus diselesaikan	√			Tim Pelayanan Publik
3.	U6 Kompetensi Pelaksana	• Rapat internal petugas pelayanan dan melakukan kegiatan : Refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
	Balai KIPM Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan melakukan sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	Sudah	Melakukan publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan sosialisasi kepada pengguna jasa	Publikasi Prosedur Layanan melalui media elektronik dan non elektronik 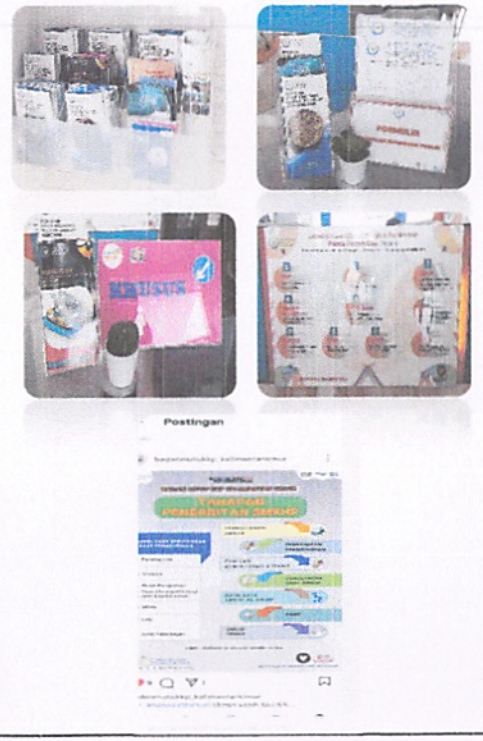	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

				Terlampir Kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa (Lap. CBIB dengan Diskan Kab. Pasir, Diskan Kab. Berau dan pemilik unit budidaya)	
	Balai KIPM Balikpapan membuat janji layanan dengan memuat jenis dan waktu layanan yang harus diselesaikan serta membuat kompensasi layanan	Sudah	Melakukan publikasi janji layanan melalui media cetak dan media elektronik	Publikasi janji layanan melalui media elektronik dan non elektronik	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan
	Balai KIPM Balikpapan Refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	Sudah	Melakukan Rapat internal petugas pelayanan dan melakukan refresment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan di kantor Balai KIPM Balikpapan dengan beberapa materi.	Undangan, daftar hadir, notulensi, sertifikat dan dokumentasi kegiatan terlampir	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
	Balai KIPM Balikpapan melakukan Publikasi prosedur layanan melalui media cetak dan media elektronik dan melakukan sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	Dokumentasi media cetak prosedur pelayanan di ruang pelayanan dan screenshot prosedur pelayanan yang telah diupload di media elektronik Foto/dokumentasi kegiatan sosialisasi, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi dan notulensi sosialisasi	< 3 bulan	Tim pelayanan public	---------
	Balai KIPM Balikpapan membuat janji layanan dengan memuat jenis dan waktu layanan yang harus diselesaikan serta membuat kompen sasi layanan	Membuat janji layanan dengan memuat jenis dan waktu layanan yang harus diselesaikan Membuat kompensasi layanan	< 3 bulan	Tim pelayanan public	---------
	Balai KIPM Balikpapan Refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	---------

		aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan			

Balikpapan, 04 Juli 2025

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan hasil Perikanan Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
NIP. 197002111997031003

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK bkipmbalikpapan@kkp.go.id

UNDANGAN

Yth. - Seluruh Pegawai

Untuk mengikuti kegiatan pada :

Hari / Tanggal	: Kamis / 17- 19 April 2025
Waktu	: 09.30 WITA s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat BKIPM Balikpapan
Acara	: Rapat Tindak Lanjut SKM Triwulan I TA.2025

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Balikpapan, 16 April 2025
Kepala Balai KIPM

Eko Sulystianto

DAFTAR HADIR ABSENSI
BALAI KIPM BALIKPAPAN

Hari / Tanggal : Kamis / 17 April 2025
Kegiatan : Tindak Lanjut SKM Triwulan I TA.2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Eko J	Kasatpel	1	
2	Kadsm B	Inspektur Mutu		2
3	Winda Anggraini	Inspektur Mutu	3	
4	Zainal	Inspektur Mutu		4
5	Suwanto	Plt APBN Terampil	5	
6	Erwin Noor F	Inspektur Mutu		6
7	Hari . S	Asmut	7	
8	Mardes Awaluddin	PPNPN		8
9	Arman	APK APBN	9	
10	Siti Hadijah	Fungsional Umum		10
11	NADIA	PJJP	11	
12	Ayu Sabrina	PPNPN		12
13	Tika Wahyu P	Arsiparis	13	
14	Endah S. H	Plt APBN		14
15	Dana Kurniawan	Arsiparis	15	
16	Ubin Mohlul Azmi	PPN PN		16
17	Widiarti Dika	PPNPN	17	
18	Narta	Inspektur Mut		18
19	Kasih	PPNPN	19	
20	Frederica Ethis M.	Inspektur Mutu		20

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

ARMANSYAH ARIANTO B, S.E

Sebagai
Peserta In House Training
"Petugas Pelayanan Prima Untuk Pelayanan Publik"
tanggal 17 - 19 April 2025"

BPP MHKP
Saving Safety through Quality

Balikpapan, 20 April 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bkipmbpp@gmail.com

Nomor : B.343/BKIPM.BPN/TU.330/V/2025 6 Mei 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Undangan Persiapan Inspeksi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik)**

Yth. 1. Kepala Dinas Perikanan Paser
2. Kepala Dinas Perikanan Berau
di tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Inspeksi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), maka bersama ini kami akan mengadakan Persiapan Inspeksi CBIB.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

hari, tanggal	: Selasa, 6 Mei 2025
waktu	: 14.00 WITA – Selesai
tempat	: Meeting ID : 852 483 4866 Passcode : bppmhkp
agenda	: Persiapan Inspeksi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Eko Sulystianto

Daftar Hadir Persiapan Inspeksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) Report

Form: Daftar Hadir Persiapan Inspeksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB)

Nama	Instansi	Jabatan	Tanda tangan	Added Time
Akhmad, Huzairin	Dinas Perikanan Kab. Paser	Penyuluh Perikanan		06-May-2025 17:
Kadson, Batubara	Balai KIPM Balikpapan	Inspektur Mutu		06-May-2025 16:
abd azis h, abd azis h	pokdakan pea paser kab paser	ketua kelompok		06-May-2025 15:
EKO, SULYSTIANTO	BADAN MUTU KKP KALIMANTAN TIMUR	KEPALA		06-May-2025 15:
ZAINAL, ZAINAL	Balai KIPM Balikpapan	Inspektur Mutu	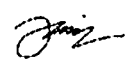	06-May-2025 15:
Rakman, SP, Rakman, SP	Dinas Perikanan Paser	Penyuluh Perikanan Ahli Madya		06-May-2025 15:
Rakaman, SP, Rakaman, SP	Dinas Perikanan Paser	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	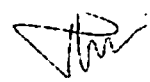	06-May-2025 15:
MAYA, SAPRINA, S.Pl	Dinas Perikanan Kab.Paser	Penyuluh Perikanan Ahli Muda		06-May-2025 15:
M, Ali	Dinas perikanan	Pembudidaya	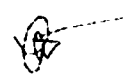	06-May-2025 15:
Hamzah, Hamzah	Dinas perikanan berau	Pembudidaya	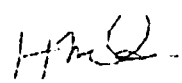	06-May-2025 15:
Heri, Supriadi	BPPMHKP Balikpapan	Asisten Inspektur Mutu		06-May-2025 15:
Lahuddin, Lahuddin	Dinas perikanan berau	Pembudidaya	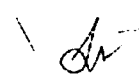	06-May-2025 15:
Dadang, Sutikno	Dinas perikanan berau	Kesiling		06-May-2025 15:
Erwin Noer, Fahlefi	BPPMHKP Balikpapan	Inspektu Mutu	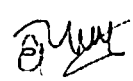	06-May-2025 15:
Selamat, Hariyadi	Dinas Perikanan Berau	Ahli pertama pengendali hama dan penyakit ikan	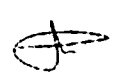	06-May-2025 15:
Winda, Anggraini	BKIPM Balikpapan	Inspektur Mutu Ahli Muda	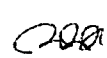	06-May-2025 15:

NOTULENSI

RAPAT TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I TAHUN 2025

BALAI KIPM BALIKPAPAN

Perihal	:	Sosialisasi Inspeksi Cara Budidaya Ikan Yang Baik Kepada Pengguna Jasa
Hari/ Tanggal	:	Selasa/ 06 Mei 2025
Peserta	:	1. Pegawai Pada Instansi Diskan Kab. Pasir dan Petani Tambak 2. Pegawai Pada Instansi Diskan Kab. Berau dan Petani Tambak 3. Inspektur Mutu lingkup Balai KIPM Balikpapan
Pengarah	:	Bapak Kepala Balai KIPM Balikpapan
Agenda Rapat	:	- Penyelesaian permasalahan (tindak lanjut perbaikan) survey kepuasan pelanggan pada unsur yang di nilai rendah yaitu **sistem, mekanisme dan prosedur** - Penyampaian materi oleh Ketua kelompok Kerja Produksi Primer yaitu Bapak Ir. Kadson Batubara, S.Pi, M.Si, sebagai salah satu bentuk implementasi terhadap unsur yang di nilai rendah dan menjadi skala prioritas perbaikan. - Materi yang di sampaikan sebagai berikut : Persiapan inspeksi CBIB • Mekanisme inspeksi CBIB dengan motode penilaian mandiri/ *Self Assesmen*t yaitu Inspeksi dilakukan melalui penilaian mandiri yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan mengisi checklist yang diberikan oleh tim inspeksi. • Pengisian cheklist penilaian mandiri/ *Self Assesmen*t cheklist diisi oleh pengguna jasa yang diberi tugas untuk melakukan penilaian mandiri terkait Cara Budidaya Ikan yang Baik pada unit budidaya. • pengecekan hasil penilaian mandiri dilakukan dengan melihat dokumen serta bukti-bukti video/ foto yang diberikan. • Penentuan jumlah nilai kesesuain dan tidak kesesuaian, serta ketahapan evaluasi dan review tim teknis untuk dilakukan usulan rekomendasi untuk mendapatkan hasil capaian. • Penyampaian waktu penyelesaian penerbitan sertifikat CBIB yaitu 52 (lima puluh dua hari) hari.

Balikpapan, 06 Mei 2025
Kepala Balai KIPM Balikpapan

Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI

SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK KE STAKE HOLDER